

Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Program Adiwiyata di Kabupaten Rokan Hilir

Firza Dwi Virdiani¹ Fajriani Ananda²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: firza.dwi1443@student.unri.ac.id¹ fajriani.ananda@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian skripsi ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Rokan Hilir, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kolaborasi pemerintah terkait untuk mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dan kerja sama antar instansi dari peraturan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. Adapun subjek penelitian ini adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Peneliti menggunakan teori Ansell & Gash (2008) dengan hasil penelitian menunjukkan proses Collaborative Governance dalam penyelenggaraan program Adiwiyata sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator (1) dialog tatap muka telah dilakukan tetapi belum terhadap semua pihak. Indikator (2) membangun kepercayaan, kepercayaan antar pihak terjadi karena komunikasi yang terjalin cukup intens. Indikator (3) komitmen terhadap proses, para pihak memiliki komitmen yang tinggi dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada para aktor. Indikator (4) pemahaman bersama ditunjukkan adanya tanggungjawab yang melekat pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pada indikator (5) hasil antara ditunjukkan belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Collaborative, Governance, Program Adiwiyata

Abstract

This thesis research is located in the Environmental Service and Education Service of Rokan Hilir, the Bagan City Non-Governmental Organization, and the Bangko District Regional Coordination, as well as the Community in the School Environment. The purpose of writing this thesis is to find out and describe the extent of the collaboration of the related governments to achieve their goals, as well as to identify the obstacles and challenges faced and cooperation between agencies from these regulations. Data collection techniques were carried out using library research and field research consisting of observation, interviews, and documentation, while informants were taken using purposive sampling. The type of research used is descriptive and will be analyzed qualitatively. The subjects of this research were officers from the Environmental Service and the Education Service, the Bagan City Non-Governmental Organization, and the Bangko District Regional Coordination, as well as the Community in the School Environment. Researchers use the Ansell & Gash (2008) theory with research results showing that the Collaborative Governance process in the implementation of the Adiwiyata program is quite good. This can be seen from indicators (1) Face-to-face dialogue has been carried out but not yet with all parties. Indicator (2) building trust, trust between parties occurs because the communication that is established is quite intense. Indicator (3) commitment to the process, the parties have a high commitment and are in line with the duties and functions inherent in the actors. Indicator (4) shared understanding is shown by the existence of responsibilities inherent in their respective duties and functions. While in indicator (5) Intermediate results showed that it was not going well.

Keywords: Collaborative, Governance, Adiwiyata Program



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas baik oleh pemerintah, peneliti, dan badan organisasi lokal maupun internasional. Hal tersebut telah menarik perhatian serius secara global oleh beberapa negara, tepatnya setelah diselenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm (Ibu kota terbesar di Swedia) yang berlangsung selama 5-11 Juni tahun 1982. Untuk memperingati sejarah tersebut, tanggal 5 Juni telah dijadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (The Environment Day) dan berdirinya badan PBB yang mengurus masalah lingkungan yaitu United Nation Environmental Programme (UNEP). Ada pun beberapa masalah lingkungan hidup yang menjadi sorotan secara global, diantaranya: pemanasan global, penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan hujan asam. Permasalahan tersebut menjadi perhatian dan perlu tindakan serius untuk kelangsungan hidup manusia. Banyak aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, polusi, dan penggunaan bahan bakar fosil, juga berkontribusi pada perubahan iklim. Perubahan Iklim (Pemanasan Global), menurut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), merupakan perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Masalah perubahan iklim ini menimbulkan krisis ekonomi, kesehatan dan keselamatan, produksi pangan, keamanan dan dimensi-dimensi yang lain. Hal yang serupa terjadi di Indonesia, kondisi lingkungan hidup di Indonesia dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Hutan di Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, yakni berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif (Kegiatan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam). Bukan hanya itu, penelusuran WALHI pada tahun 2019 didapatkan data yang cukup mencengangkan, dimana penguasaan lahan sawit di Indonesia ternyata hutan yang dikuasai oleh konglomerat sawit ini sebesar 12.3 juta hektar. Dari total luas hutan yang sudah mendapat lampu hijau dan mengantongi izin tersebut, 5.8 juta hektar diantaranya sekarang ini sudah menjadi perkebunan sawit.

Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan upaya pencegahan dengan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif yaitu asuransi lingkungan hidup. Pengembangan asuransi lingkungan hidup terhadap perusahaan yang memiliki dampak penting. Data ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk mengkaji ulang arah kebijakan yang sudah dibentuk. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang saling terikat, berinteraksi dan selalu mempengaruhi. Perilaku manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan pun dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini, berarti antara manusia dengan lingkungan akan selalu terjadi hubungan timbal balik. Manusia dan lingkungan juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Manusia membutuhkan lingkungan untuk dijadikan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan dan begitu juga dengan lingkungan yang membutuhkan manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Sekecil apa pun usahanya, manusia harus berupaya melestarikan lingkungan hidup. Manusia harus dilatih untuk selalu melakukan pelestarian. Pelestarian dan pemanfaatan sangat diperlukan, agar terwujud lingkungan yang sehat, meningkatnya kualitas hidup, dan penuh dengan kekayaan alam agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Manusia bergantung pada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan bahan baku. Hubungan antara manusia dan lingkungan sangat penting untuk kesejahteraan bersama.

Dengan memahami dan menghargai interaksi ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Khususnya pada anak-anak, lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan karakter. Bila anak-anak tersebut berada di lingkungan yang baik, maka akan memberikan dampak yang baik kepada perkembangan karakternya, dan juga sebaliknya. Pembangunan karakter anak bangsa harus menjadi perhatian utama. Salah satu yang harus diperhatikan dan dikembangkan adalah perilaku untuk peduli lingkungan. Anak-anak harus dilatih sejak dini untuk bersikap responsif terhadap masalah lingkungan, supaya tidak timbul sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Anak-anak juga harus dididik supaya mempunyai moral, sikap yang bertanggung jawab dan rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya.

Hal ini dilaksanakan agar anak-anak memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang lingkungan hidup. Memahami upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan, serta memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta dampak negatif yang akan ditimbulkan. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah tidak tertanamnya karakter peduli lingkungan dan tanggung jawab dengan baik. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Dalam suatu perencanaan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak harus dilibatkan dalam bentuk pemberian informasi dan konsultasi. Berdasarkan pengamatan, anak-anak yang bersekolah di sekolah konvensional cenderung belum diberikan kesempatan untuk ber eksplorasi lebih aktif, kegiatan yang dilakukan hanya memanfaatkan benda-benda yang ada disekitar. Kegiatan yang dilakukan sekolah konvensional biasanya hanya melakukan kegiatan pembelajaran berupa membaca, menulis dan berhitung, anak-anak pun kurang mendapat kesempatan untuk belajar melalui medianya sendiri dan hanya mengandalkan media dari guru mereka. Di sekolah konvensional pun masih kurang dalam menjadikan lingkungan alam sebagai sarana sumber belajar yang dapat dieksplorasi lebih luas.

Setiap kegiatan pendidikan, unsur lingkungan memegang peranan yang sangat penting, karena dengan perantaraan lingkungan tersebut dapat membentuk watak, sifat, dan karakter seseorang. Lingkungan memberikan corak dan warna tersendiri terhadap perkembangan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari tiga lingkungan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, mengingat pendidikan adalah kewajiban setiap manusia. Lingkungan tersebut adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan pembelajaran yang mengeksplorasi alam lebih luas, salah satu sekolah formal yang menyediakan fasilitas tersebut adalah Sekolah Alam. Sekolah Alam adalah model sekolah yang tidak umum, namun memiliki cara tersendiri dalam metode dan mendidik anak murid. Sekarang ini, Sekolah Alam menjadi salah satu sekolah yang banyak diminati. Dengan konsep terbuka dan menyatu dengan alam, memberikan banyak sekali manfaat khususnya anak-anak yang sedang berada pada tahap berkembang. Di setiap pendidikan, masing-masing memiliki pengembangan kurikulum yang berbeda. Konsep kurikulum Sekolah Alam dirancang sedemikian rupa agar anak-anak dekat dengan alam dan pengajarannya sesuai dengan psikologi anak. Konsep pengembangan kurikulum di setiap sekolah alam juga berbeda-beda.

Sekolah Alam biasanya mengembangkan kurikulum dengan konsep akhlak, logika, *leadership*, *Outbond Training*, *Spider Web*, *Experiential Learning*, *Story Telling*, dan *Learning by Qudwa*. Bangunan yang terbuka (tanpa sekat), juga dirancang supaya anak-anak menyatu dengan alam. Anak-anak dididik bukan hanya untuk mempelajari mata pelajaran umum, tetapi disini anak-anak diajarkan bagaimana mencintai alam dan peduli lingkungan, diajarkan bagaimana bertanggung jawab, dan berakhlak yang mulia. Mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan. Kesimpulannya ialah Pendidikan dapat ditempuh dimana saja, bahkan di alam terbuka. Khususnya pada anak-anak, agar menumbuhkan karakter dan menularkan dampak yang baik pada orang lain. Karena didikan untuk mencintai, merawat, dan menjaga alam sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memelihara dan menyelamatkan lingkungan yang harus ditanamkan sejak dini yaitu dengan Program adiwiyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, yang bersifat analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan kerangka penelitian yang bergantung pada persepsi suatu fenomena, dengan menggunakan pendekatan yang menghasilkan analisis deskriptif yang dimanifestasikan dalam bentuk ekspresi verbal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sahir (2021). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivismenya. Menurut Fadli (2021) Penelitian kualitatif bila digunakan dalam pendidikan memiliki tujuan tertentu yaitu untuk memahami dan mengeksplorasi secara mendalam dan empati proses, aktivitas, pola-pola, model, prosedur, dan evaluasi dalam ranah pendidikan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman umum tentang kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman ini tidak diprediksi sebelumnya, tetapi diperoleh melalui analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Setelah melakukan analisis tersebut, kesimpulan yang diambil adalah pemahaman umum yang bersifat abstrak mengenai kenyataan-kenyataan yang diteliti. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah agar peneliti dapat melihat lebih mendalam bagaimana proses collaborative governance dalam penyelenggaraan program adiwiyata di kabupaten Rokan Hilir dan bisa di analisis secara meluas sehingga dapat terjawab rumusan masalah yang diangkat peneliti melalui proses pengumpulan data dan wawancara melalui pengumpulan data metode penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Program Adiwiyata di Kabupaten Rokan Hilir

Dalam penelitian ini, untuk melihat bagaimana collaborative governance dalam Penyelenggaraan program Adiwiyata di Kecamatan Bangko, maka penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan dengan konsep teori yang di kemukakan oleh Ansell & Gash (2008) yang terdiri. Dimana dalam collaborative governance dalam Ansell & Gash diukur menggunakan 5 indikator,

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*), Face to Face Dialogue (Pertemuan Tatap Muka) dalam kolaborasi terkait collaborative governance dalam penyelenggaraan program adiwiyata di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dan Sekolah negeri maupun swasta yang mengikuti program adiwiyata. Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki program adiwiyata tersebut kemudian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengajak sekolah- sekolah yang belum berpartisipasi dalam kategori sekolah adiwiyata bisa mendaftarkan sekolah nya juga seperti sekolah yang sudah mengikuti lainnya. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dalam mengedukasi tentang bagaimana pentingnya program adiwiyata adalah dengan cara sosialisasi dengan sekolah yang belum mengikuti program adiwiyata. Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertemuan tatap

muka ini masih kurang maksimal, karena masih adanya oknum- oknum yang belum mengetahui bagian-bagian dari Program Adiwiyata. Sehingga peneliti berharap baik dinas maupun sekolah-sekolah juga seharusnya dapat menyampaikan kepada pihak yang terlibat seperti orang tua murid untuk dapat mengetahui apa-apa saja yang termasuk di dalam Program Adiwiyata.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), Kepercayaan diri seseorang didasarkan pada kebutuhan dari orang lain dan bukan kemampuan pada diri mereka sendiri. Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011), dalam mengukur keberhasilan *collaborative governance* salah satunya yaitu adanya rasa saling percaya antara faktor yang dilandasi oleh hubungan profesional atau sosial dengan keyakinan bahwa aktor mempercayakan informasi atau upaya dalam satu jaringan untuk mencapai tujuan. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka bisa percaya terhadap rekan kerja lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintah atau pun swasta. Dari masing-masing yang dijelaskan dalam proses wawancara diatas oleh para *stakeholders* yang terlibat dalam melakukan trust building (membangun kepercayaan) untuk penyelenggaraan program adiwiyata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membangun kepercayaan sudah dilaksanakan secara efektif.
3. Komitmen Terhadap Proses (*Comitment to Process*), Komitmen adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu prosedur dalam rangka mencapai tujuan yang di inginkan. Untuk melakukan kegiatan kolaboratif, harus ada inisiatif dari masing-masing pemangku kepentingan untuk tugas-tugas tertentu. Setiap mitra mengetahui tentang usaha yang menjadi bagiannya dan bertanggung jawab atas penugasan tersebut. Pemangku kepentingan diharuskan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan di masa depan. Pandangan Ansell & Gash dalam Rahmawati (2016), bahwa tingkat komitmen pemangku kepentingan untuk kolaborasi adalah variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan penerapan *collaborative governance*. Komitmen dalam proses dapat dicapai melalui saling mengakui, kepemilikan terhadap proses, dan keuntungan yang di dapat melalui proses kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan terkait penanganan penyelenggaraan Program Adiwiyata di Kecamatan Bangko. Peneliti menemukan adanya upaya dari para *stakeholders* untuk menjaga komitmen dalam penyelenggaraan Program Adiwiyata. Sekolah-sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata juga berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian sekolah mereka, agar bermanfaat bagi siapa pun.
4. Saling Memahami (*Share Understanding*), Pandangan Ansell & Gash (2008), bahwa di beberapa tempat dalam siklus kooperatif, mitra harus menumbuhkan pemahaman khas tentang apa yang pada umumnya dapat mereka capai bersama. Kesepakatan tentang definisi masalah atau pengetahuan yang relevan di perlukan untuk menyelesaikannya adalah contoh lain dari pemahaman bersama. Proses pembelajaran dapat mencakup pengembangan pemahaman bersama. Misi yang jelas, definisi masalah bersama, dan identifikasi nilai-nilai bersama adalah semua cara untuk berbagi pemahaman. Pemahaman bersama dalam suatu kegiatan atau agenda yang akan dicapai adalah milik bersama dan akan menjadi tanggung jawab bersama, untuk mengidentifikasi permasalahan agar memiliki pemahaman yang sama antar *stakeholders* serta menyadari nilai nilai dasar yang menjadi dasar dari kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Dari masing-masing yang dijelaskan dalam proses wawancara diatas oleh para *stakeholders* yang terlibat dalam melakukan *share understanding* (pemahaman bersama) untuk penyelenggaraan program adiwiyata telah dilakukan. Terkhusus kepada sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman bersama sudah dilaksanakan dengan optimal hal ini tampak jelas dan juga kolaborasi juga masih dijalankan.

5. Hasil Antara (*Intermediate Outcome*), Studi kasus menunjukkan bahwa etika tujuan dan manfaat kolaborasi relatif jelas dan ketika kolaborasi cenderung berhasil, kolaborasi lebih mungkin terjadi. Dalam proses ini, hasil sementara ditafsirkan sebagai hasil proses yang signifikan untuk membangun momentum yang mengarah pada kolaborasi yang sukses, terlepas dari kenyataan bahwa hasil antara dapat mewakili keluaran yang sebenarnya. Siklus membangun kepercayaan dan komitmen yang baik dapat dipupuk sebagai hasil dari keberhasilan yang memberi umpan balik ke dalam proses kolaboratif. Hasil yang di dapat dalam proses kolaborasi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir kurang berpartisipasi dalam kegiatan Adiwiyata, tetapi tetap mendukung.

faktor penghambat Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Program Adiwiyata di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Dalam penelitian ini, Dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerjasama yang akan dilakukan yang akan dilaksanakan, untuk selalu harus berjalan dengan lancar tentu akan mengalami berbagai kendala-kendala yang akan di hadapi. Kendala akan muncul pada collaborative governance dalam penyelenggaraan program adiwiyata di Kabupaten Rokan, kendala juga dapat mempengaruhi sebuah keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu dalam terwujudnya keberhasilan dari program Adiwiyata Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

1. Insentif yang masih belum di terapkan. Insentif yang belum ada bagi aktor yang menjalankan program Adiwiyata di sekolah dapat menjadi penghalang signifikan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Meskipun banyak individu, seperti guru, siswa, dan staf, berusaha keras untuk mewujudkan inisiatif lingkungan, tanpa adanya dukungan yang memadai, motivasi mereka bisa berkurang. Salah satu aspek yang kurang adalah pengakuan resmi terhadap upaya yang dilakukan oleh para aktor ini. Tanpa penghargaan atau pengakuan, baik individu maupun kelompok mungkin merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai, yang dapat menurunkan semangat dan partisipasi mereka dalam program. Penghargaan formal, seperti sertifikat atau apresiasi dari pihak sekolah, bisa menjadi pendorong yang kuat untuk terus berkomitmen. Dari sisi finansial, tidak adanya anggaran khusus untuk program lingkungan juga menjadi kendala. Tanpa dana yang cukup, banyak ide kreatif yang diusulkan oleh guru atau siswa tidak dapat diwujudkan. Misalnya, kegiatan penanaman pohon atau pembuatan taman belajar mungkin terhambat karena kurangnya sumber daya. Ketika aktor merasa bahwa inisiatif mereka tidak dapat direalisasikan, mereka cenderung kehilangan motivasi untuk berkontribusi lebih lanjut. Fasilitas pendukung yang kurang memadai juga menjadi masalah. Banyak aktor yang berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan, namun tanpa tempat sampah terpisah atau alat untuk mendukung kegiatan daur ulang, mereka akan kesulitan menerapkan prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari. Ini bisa membuat mereka merasa frustrasi dan akhirnya mengurangi partisipasi mereka.
2. Ego Sektoral Antar Stakeholders. Pendapat dari narasumber yang telah memberikan keterangan bahwa bahwa ego sektoral antar stakeholders menjadi salah satu penghambat proses kolaborasi dalam penyelenggaraan Program Adiwiyata. Masing-masing dinas hanya merasa bertanggung jawab dengan tatanan Adiwiyata yang telah ditentukan, tanpa memperhatikan tatanan yang dijalankan oleh dinas lain. Hal tersebut yang menjadikan pelaksanaan Program Adiwiyata sedikit terhambat. Ketika stakeholder dari sektor pendidikan, lingkungan, dan pemerintah beroperasi dalam ruang lingkup mereka masing-masing, sering kali muncul kompetisi yang mengalihkan fokus dari tujuan bersama. Misalnya, sekolah mungkin lebih berkonsentrasi pada pencapaian akademis dan kegiatan kurikuler, sementara Dinas Lingkungan Hidup lebih menekankan pelaksanaan regulasi dan

kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Ketidakselarasan prioritas ini menciptakan kesulitan dalam menyatukan visi dan misi, sehingga menghambat upaya kolaboratif. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara stakeholder juga sering kali menjadi pemicu ego sektoral. Ketika masing-masing pihak tidak saling berbagi informasi atau memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pihak lain, terciptalah kesenjangan yang memperburuk situasi. Misalnya, guru mungkin merasa bahwa program lingkungan tidak relevan dengan kurikulum yang ada, sementara pihak Dinas Lingkungan Hidup merasa bahwa sekolah tidak cukup berkomitmen terhadap isu-isu lingkungan.

Dampak dari ego sektoral ini bisa sangat merugikan. Tanpa adanya sinergi, inisiatif yang mungkin memiliki dampak positif yang besar menjadi terhambat. Program-program yang seharusnya bisa berjalan dengan baik menjadi terfragmentasi dan kurang efektif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kepercayaan antar pihak dan menciptakan suasana kerja yang kurang harmonis. Untuk mengatasi ego sektoral, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Membangun komunikasi yang terbuka, menetapkan tujuan bersama, dan menciptakan platform untuk berbagi informasi dapat membantu mengurangi ketegangan antar stakeholder.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Program Adiwiyata yang sudah ada sejak 2014 masih belum mengundang partisipasi dari banyak sekolah. Dilihat dari jumlah partisipasinya para *stakeholders* harus bisa menambah jumlah sekolah Adiwiyata karena ini merupakan suatu program yang akan mempengaruhi pengetahuan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Kemudian Insentif yang masih belum diterapkan dan Ego Sektoral antar *stakeholders* juga masih menjadi kendala sampai saat ini.

Saran

1. Untuk insentif yang masih belum diterapkan, diharapkan ada kebijakan yang mendukung penerapan insentif bagi sekolah yang berhasil menjalankan program Adiwiyata dengan baik. Insentif tersebut bisa berupa dana tambahan, penghargaan, atau fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan keberhasilan program. Selain itu, penting untuk menyediakan dana hibah bagi proyek lingkungan yang diusulkan oleh sekolah.
2. Untuk ego sektoral antar stakeholders, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Membangun komunikasi yang terbuka, menetapkan tujuan bersama, dan menciptakan platform untuk berbagi informasi dapat membantu mengurangi ketegangan antar stakeholder. Dengan cara ini, semua pihak dapat merasa terlibat dan memiliki peran dalam mencapai tujuan bersama, sehingga program seperti Adiwiyata dapat terlaksana dengan lebih baik dan efektif.

DAFTAR PUSTKA

- Belajar, K., Dokumen, A. P., & Berbagai Sumber, D. (2021). .2 Dasar-dasar Dokumentasi [?] Arti dan Sejarah Istilah Dokumentasi.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hilir, DLH. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjp) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, Diakses dari

<http://www.menlh.go.id/informasimengenai-Adiwiyata/> pada tanggal 18 November 2023

- Nasution, M. S., Syahza, A., Rusli, Z., Mayarni, M., Mashur, D., Zulkarnaini, Z., & Ananda, F. (2025). Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 121-142.
- Nasution, M. S., Syahza, A., Rusli, Z., Mayarni, M., Mashur, D., Zulkarnaini, Z., & Ananda, F. (2025). Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 121-142.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.